



Politik sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera

Cecep Suryana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

cecep.suryana@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This paper describes the dynamics of political communication run by the Partai Keadilan Sejahtera (PKS), which has been identified as a da'wa party. By using the phenomenological method, this paper describes the knowledge and experience of political communication which is framed as an Islamic da'wa movement which is the character of the PKS struggle which is focused on the concept of PKS da'wa and how political communication activities are carried out. This study shows that the PKS da'wa concept is inspired by Hasan Al-Banna's universalist thought and da'wa movement because da'wa must be a practical answer to all social problems for all mankind, not only for Muslims. Therefore, politics is nothing but a medium of da'wa. Meanwhile, the pattern of political communication carried out by PKS is categorized into two categories, namely; communication to cadres, generally through Islamic and political studies; and communication in the context of succession or facing regional elections which are usually carried out through social service activities, public recitations and door to door socialization.

Keywords: *Politics, Political Communication; Partai Keadilan Sejahtera; Da'wa movement*

ABSTRAK

Tulisan ini menguraikan tentang dinamika komunikasi politik yang dijalankan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diidentifikasi sebagai partai yang berorientasi dakwah. Menggunakan metode fenomenologi, tulisan ini menguraikan tentang pengetahuan dan pengalaman komunikasi politik yang dikerangka sebagai gerakan dakwah Islam yang menjadi karakter perjuangan PKS yang difokuskan pada konsep dakwah PKS dan bagaimana aktivitas komunikasi politik yang dijalankan. Kajian ini menunjukkan bahwa konsep dakwah PKS banyak mendapat inspirasi dari gerakan dan pemikiran dakwah Hasan Al-Banna yang bersifat universalis dalam arti bahwa dakwah harus mampu menjadi jawaban praktis atas semua persoalan sosial-kemanusiaan, tidak hanya bagi umat Islam. Oleh karena itu, politik tidak lain merupakan salah satu medium dakwah. Sementara itu, pola komunikasi politik yang dijalankan oleh PKS dikategorikan pada dua kategori besar yakni; komunikasi terhadap kader yang pada umumnya melalui kajian-kajian Islam dan politik; dan komunikasi dalam konteks suksesi atau menghadapi perhelatan pilkada yang biasanya dilakukan melalui kegiatan bakti sosial, pengajian umum dan sosialisasi secara *door to door*.

Kata kunci: Politik, Komunikasi politik; Partai Keadilan Sejahtera; Gerakan dakwah

PENDAHULUAN

Setelah jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang sekaligus menjadi titik awal munculnya kekuatan-kekuatan politik yang baru dalam masyarakat Indonesia. Kekuatan politik yang baru tersebut ditandai dengan munculnya beberapa partai berbasis agama Islam, salah satunya adalah Partai Keadilan yang kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat menjadi PKS. Namun karena dinamika yang terus berkembang, pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) tanggal 1-3 Februari 2008 yang diselenggarakan di Bali, PKS secara resmi menegaskan eksistensinya secara terbuka untuk berkerjasama dengan berbagai elemen kekuatan bangsa. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 pada tanggal, 16-20 Juni 2010 di Jakarta yang kemudian menjadikan PKS sebagai partai terbuka (inklusif).

Keterbukaan ideologi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditunjukkan dengan perubahan semboyan partai menjadi “PKS untuk semua” dan mulai disosialisasikan pada Pemilu tahun 2009 serta perubahan visi dan misi serta AD/ART partai sehingga dapat melegalkan keanggotaan yang berasal dari kalangan non-Muslim. Hal ini didasarkan pada signifikansi dukungan sebagian kalangan non-Muslim di berbagai daerah. Selain itu indikator keterbukaan PKS dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh elite-elite PKS dalam skala nasional maupun skala lokal. Keterbukaan dalam hal ini adalah sikap toleransi, proporsional, moderat serta dapat bekerjasama dengan siapapun, bahkan dengan partai lain meski memiliki pandangan politik yang berbeda.

Dalam konteks politik praktis, keterbukaan terhadap partai dengan platform yang berbeda mengindikasikan bahwa jarak ideologi diantara partai-partai politik saat ini semakin menyatu dan semakin tidak ada sekat. Giovanni Sartori menyebut fenomena ini sebagai kecenderungan sentripetal dalam partai politik yang sekaligus merupakan salah satu ciri dari kehidupan demokrasi yang baik (Surbakti, 2010: 128). Hal ini disebabkan oleh pengetahuan umum bahwa partai politik merupakan suatu organisasi dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai yang sama untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik agar dapat melaksanakan programnya, karena kekuasaan dan kedudukan politik diperoleh secara konstitusional dalam rangka memengaruhi dan melaksanakan kebijakan umum (*public policy*) (Arifin, 2011: 30).

Untuk mencapai hal tersebut, seluruh partai politik menjaga basis massa yang dimilikinya dengan mengoptimalkan komunikasi politik yang dijalankan. Secara teoretik, komunikasi politik dapat dijelaskan sebagai pembicaraan yang bertujuan untuk memengaruhi dalam kehidupan bernegara (Arifin, 2011: 8-9). Perpaduan komunikasi dan politik membuat komunikasi keluar dari “tempurung” proses yang bersifat mekanistik karena komunikasi politik mengaitkan

komunikasi dengan unsur-unsur kekuasaan, ideologi, demokrasi dan sebagainya, telah membawa komunikasi kearah lintas disiplin atau multidisipliner. Oleh sebab itu, komunikasi politik bersifat “tidak bebas nilai” karena sangat berhubungan dengan faktor sejarah dan kultural, termasuk ideologi, sistem politik, sistem sosial dan sistem ekonomi suatu negara-bangsa. Dalam konteks partai politik, komunikasi politik merupakan penghubung segala informasi atau pesan baik verbal maupun nonverbal terhadap masyarakat luas dan anggota partai politik itu sendiri.

Secara spesifik, salah satu upaya komunikasi politik yang dijalankan PKS adalah dengan mempromosikan keterbukaan ideologi partai yang akan membawa citra baru bagi PKS yang lebih inklusif. Meskipun demikian, PKS telah sejak lama identik sebagai partai Islam yang beorientasi dakwah sehingga seringkali disebut-sebut sebagai partai dakwah. Identitas ini tidak hanya disebabkan oleh faktor historis yang dimiliki PKS, tetapi juga dari pandangan ideologi politik yang berbasis etika Islam yang melihat bahwa politik harus bertujuan untuk *amar mar’uf dan nahyi munkar*. Dengan kesadaran ini, maka produk politik Islam tidak boleh sektarian atau terbatas hanya untuk kepentingan umat Islam saja, melainkan juga harus memberikan keadilan dan rahmat bagi orang banyak (*rahmatan lil-’alamin*).

Oleh sebab itu, sebagai partai dakwah, PKS secara tidak langsung telah menjadikan politik sebagai medium bagi upaya amar ma’ruf nahyi munkar yang menjadi karakteristik dan tujuan mendasar dari setiap aktivitas dakwah. Hal ini menjadikan komunikasi politik yang dijalankan oleh PKS juga merupakan bagian dari aktivitas dakwah. Dengan asumsi tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan tentang bagaimana konsep dakwah yang dipahami oleh PKS dan bagaimana pula komunikasi politik yang dijalankan oleh PKS sebagai bagian dari transformasi nilai-nilai dakwah yang menjadi karakteristik ideologi partai.

Namun demikian, disadari bahwa sejumlah kajian sebelumnya yang mengulas tentang PKS sebagai partai dakwah telah banyak dilakukan dalam perspektif dan kasus yang berbeda-beda. Antara lain yang mengkaji tentang kontribusi pemikiran politik Hasan Al-Banna terhadap pandangan politik PKS (Nurulloh, 2018); PKS dan relasinya dengan partisipasi politik kaum perempuan (Boangmanalu, 2019; Susanti & Lubis, 2015); beberapa faktor kemenangan PKS di wilayah abangan di salah satu desa di Semarang pada Pemilu 2004 (Haris, 2008); pola rekrutmen dan pembinaan kader partai dalam membangun dan memperkokoh solidaritas partai (Djuhana & Nuraeni, 2019); public relations politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu (Muchtar & Aliyudin, 2019); dilema dan pergulatan kepentingan yang dihadapi PKS antara kepentingan dakwah dan kepentingan politik (Basyir, 2014; Nurussa’adah & Sumartias, 2017; Supriyatna, 2017; Syamsuadi et al., 2020); dan kajian tentang manhaj tarbiyah

dalam pendidikan politik kader PKS (Sholeh, 2015; Tanjungsari, 2016).

Beberapa penelitian di atas secara umum menggambarkan tentang pandangan politik PKS dan kaitannya dengan gerakan dakwah yang dijalankannya. Oleh sebab itu, tulisan ini memiliki fokus yang berbeda karena akan melihat dan mengkaji seluruh fenomena tersebut dalam kerangka komunikasi politik sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih baru. Secara spesifik, penelitian ini menguraikan tentang wawasan dakwah PKS sebagai sebagai partai dakwah dan bagaimana komunikasi politik yang dijalankan sehubungan dengan posisi dan identitas sebagai partai dakwah yang secara umum dipahami sebagai gerakan perubahan berdasarkan ajaran Islam. Untuk mengupas hal tersebut, beberapa uraian teoretik disajikan, khususnya terkait dengan wacana dan praktik dakwah serta komunikasi politik.

Secara teoretik, dakwah merupakan upaya perubahan suatu masyarakat sehingga sesuai dengan ajaran Islam dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Secara bahasa, dakwah berarti panggilan, ajakan, atau seruan (lihat, misalnya Hasjmy, 1983; Syukir, 1983; Sambas, 1995; Mulkhan, 1996; Muhyiddin, 2002; Fakhruroji, 2014). Kata dakwah dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali sehingga mengisyaratkan bahwa dakwah merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia (Muhyiddin, 2002: 20). Lebih spesifik lagi, Sambas (1995: 38) menjelaskan bahwa dakwah merupakan proses transmisi, transformasi dan internalisasi Islam dengan menggunakan metode dan media tertentu, dalam upaya mencapai tujuan tertentu pula.

Luasnya cakupan praktik dakwah dalam kehidupan manusia sekaligus mengisyaratkan bahwa dakwah dapat dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan politik, terutama jika dakwah dikaitkan dengan tujuan pembentukan masyarakat yang beradab. Bahkan sejarah perkembangan Islam sendiri sebagian besar menggambarkan kehidupan politik sebagai penopang peradaban masyarakat. Dalam kerangka ini, aktivitas politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islami adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya dakwah. Dalam perspektif dakwah, konstituen dapat dipahami sebagai individu atau kelompok masyarakat yang menerima informasi berupa komponen pesan-pesan dakwah. Pembicaraan pesan-pesan politik dalam kerangka dakwah tergambar dari bagaimana para politikus mengajak seluruh masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Dalam konteks inilah signifikansi komunikasi politik menjadi relevan untuk dipahami secara mendalam.

Jika ditinjau dari tujuan ideal, politik itu sendiri bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik yang dijalankan melalui sebuah sistem kekuasaan atau pemerintahan. Di sisi lain, aktivitas dakwah juga pada dasarnya merupakan aktivitas politik karena berkaitan dengan tugas manusia sebagai *kehalifah* (pemimpin, pengganti) di muka bumi sebagaimana ditegaskan

dalam sejumlah ayat Al-Quran. Secara literal, kata *kehalifah* dalam Al-Quran seringkali merujuk pada tugas manusia sebagai penerima mandat yang diberikan oleh Allah untuk mengatur kehidupan agar sejalan dengan perintah Allah. Dalam konteks inilah sesungguhnya titik temu yang paling fundamental antara politik dan aktivitas dakwah dapat dipahami secara tegas. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika menelusuri sejarah dakwah akan banyak beririsan dengan konteks politik umat Islam.

Namun dalam praktiknya, gagasan-gagasan dan idealisme politik tetap harus dapat disampaikan dengan baik sehingga di sinilah letak pentingnya komunikasi politik. Secara teoretik, komunikasi adalah upaya-upaya sistematis yang dilakukan untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat atau sikap. Definisi ini menunjukkan bahwa objek kajian ilmu komunikasi bukan hanya penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan opini publik dan sikap publik yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik akan membawa peranan penting.

Komunikasi juga didefinisikan sebagai pengamatan atas produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui pengembangan teori yang dapat teruji dan dapat digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses dan pengaruh, serta sistem tanda dan lambang tersebut. Dari pengertian ini, objek pengamatan yang jadi fokus perhatian dalam ilmu komunikasi adalah produksi, proses, dan pengamatan sistem-sistem dan lambang dalam konteks kehidupan manusia.

Oleh sebab itu secara teoretik, komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai upaya menyampaikan pesan-pesan politik dengan cara-cara tertentu dan berhubungan dengan *feedback* yang dihasilkan. Sebagaimana praktik komunikasi dalam konteks lainnya, komunikasi politik juga mempersyaratkan elemen-elemen komunikasi. Secara spesifik, elemen mendasar dari komunikasi politik meliputi; *pertama*, komunikator politik, yakni pelaku komunikasi politik yang komunikator utamanya adalah para pemimpin politik atau pejabat pemerintah; *kedua*, pesan politik yang pada umumnya terkait kekuasaan, pengaruh dan otoritas (Littlejohn & Foss, 2008).

Dilihat dari fungsinya, komunikasi politik dapat dipahami sebagai upaya-upaya pembentukan kesepakatan menyangkut banyak hal, misalnya pembagian sumber daya dan kekuasaan atau bagaimana proses pembuatan kesepakatan tersebut. Sementara itu komunikasi politik dalam kajian komunikasi dipahami sebagai pesan dengan bobot politik yang bertujuan untuk memengaruhi pihak lain dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian, yang pertama lebih memfokuskan pada aktivitas politik sedangkan yang kedua adalah berfokus pada pesan bercirikan politik. Oleh sebab itu, DeFleur (dalam Tabroni, 2012) dalam istilah yang paling sederhana, komunikasi politik merupakan sebuah

aktivitas yang tidak berbeda dengan praktik komunikasi lainnya, namun memiliki muatan-muatan politik.

Definisi lain juga disampaikan oleh [Heryanto & Rumaru \(2012: 2\)](#) bahwa “komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik kepada khalayak, melalui media tertentu yang bertujuan untuk memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu kepentingan tertentu di masyarakat. Dengan demikian, inti dari komunikasi politik adalah sebuah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu.”

Selain itu, ada juga yang mendefinisikan bahwa komunikasi politik adalah sebagian atau seluruh proses transmisi, pertukaran, dan pencarian informasi (termasuk fakta, opini, keyakinan dan lainnya) yang dilakukan oleh para partisipan dalam kegiatan politik secara terlembaga. Definisi ini menghendaki proses komunikasi politik yang dilakukan secara lembaga karena komunikasi yang dilakukan di rumah antar-teman atau antar-saudara tidak termasuk ke dalam fokus kajian komunikasi politik ([Tabroni, 2012, 2017](#)).

Secara praktis, pesan politik berarti konten yang memiliki kekuatan dalam mengonstruksi realitas seorang komunikator politik. Pesan politik juga menjelaskan perencanaan politik dalam waktu tertentu. Dan [Nimmo \(2005\)](#) menguraikan beberapa jenis-jenis pesan politik antara lain: (a) retorika, yakni seni berbahasa secara persuasif dan efektif yang bertujuan untuk memengaruhi lawan bicara demi menyamakan persepsi dengan komunikator; (b) iklan politik, yakni bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu agar khalayak bersedia memilih tawaran-tawaran yang diberikan; (c) propaganda, yakni bentuk komunikasi paling ekstrim dalam dunia politik karena pesan disampaikan terus-menerus demi menciptakan opini publik.

Terdapat berbagai ragam bentuk komunikasi politik yang umum dilakukan oleh politikus, profesional dan aktivis politik untuk mencapai tujuan politiknya. Ada sembilan bentuk komunikasi politik yang sering muncul ke permukaan, yakni; retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, *public relations* politik, lobi politik, kampanye politik, pemasaran politik, branding dan promosi politik dan penelitian politik. Dalam menguraikan fokus yang dikaji, tulisan ini menggarisbawahi tentang konsep dakwah yang berkembang dalam konteks politik PKS dan bagaimana komunikasi politik itu dilakukan.

Untuk mencapai hal tersebut, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menguraikan penjelasan dan fenomena-fenomena komunikasi politik yang dijalankan oleh PKS dengan menggunakan metode fenomenologi sehingga lebih fokus pada pengalaman para fungsionaris PKS terkait pemahaman dakwah dan konteks komunikasi politik yang dijalankan. Informan ditentukan secara purposif yakni dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai

dengan tujuan penelitian.

Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati konteks dan fenomena yang berhubungan dengan tujuan penelitian, sedangkan wawancara dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui pandangan dan pengalaman masing-masing informan terkait fokus penelitian, yakni konsep dakwah PKS dan pola komunikasi politik yang dijalankan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan sebagai langkah untuk melengkapi berbagai temuan yang diperoleh melalui teknik-teknik sebelumnya sehingga teknik ini juga merupakan salah satu upaya verifikasi temuan-temuan sementara di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dakwah Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan nama salah satu partai berbasis Islam di Indonesia dan berdiri pada tahun 1998 yang pada saat pendiriannya menggunakan nama Partai Keadilan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikenal sebagai partai dakwah karena motivasi pembentukan partai ini memang berangkat dari tujuan untuk melakukan dakwah dalam bidang politik. Partai ini mengusung ciri utama yakni sebagai partai yang bersih, peduli dan professional. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki kantor pusat di Jakarta. Sebagai partai yang didirikan dan berkembang di Indonesia, PKS memiliki visi menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, gagasan dan idealisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejalan dengan gagasan masyarakat madani. Namun secara praktis, pengertian masyarakat madani menurut PKS adalah masyarakat yang peradaban yang tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma-norma hukum, moral, yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis dan bergotong-royong dalam menjaga kedaulatan negara (Suroto, 2015).

Secara historis, kelahiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat dibagi menjadi tiga fase; pertama, fase dakwah kampus dimana para aktivisnya berusia muda dan berbasis kampus dan sekolah-sekolah dalam bentuk Rohani Islam. Kedua, fase kelembagaan kampus yang umumnya berkembang melalui lembaga-lembaga dakwah kampus (LDK) dimana masjid-masjid kampus menjadi pusat kegiatan dakwah. Ketiga, fase gerakan politik yang dimotori oleh KAMMI, alumni LIPIA, alumni Arab Saudi dan Timur Tengah lainnya (Rokhmad, 2014).

Fase-fase ini sekaligus merupakan identifikasi sejarah gerakan PKS pada masa-masa awal yang banyak menggunakan strategi dakwah kampus ke dakwah dalam konteks pemerintahan melalui politik praktis. Sejarah ini pulalah yang

memperkuat identitas PKS sebagai partai dakwah. Tidak hanya itu, pendirian PKS juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari tujuan-tujuan berikut; (1) membebaskan seluruh bangsa Indonesia dari semua bentuk kezaliman; (2) membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang Islami; (3) mempersiapkan bangsa Indonesia untuk mampu menjawab problematika dan tuntutan di masa mendatang; (4) membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai luhur; dan (5) turut membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa (Rokhmad, 2014).

Jika dilihat dari tahapan-tahapan dakwah yang dijalankan oleh PKS dapat diidentifikasi beberapa strategi islamisasi dari islamisasi kampus ke islami Negara. Kegiatan pembinaan rutin yang dilakukan setiap minggu merupakan media untuk menguatkan militansi sesama kader yang dalam praktiknya dipelihara atau diasuh oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan *murobbi*.

Salah satu ciri khas dari gerakan dakwah politik PKS adalah pengarustamaan keluarga. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa keluarga merupakan *basic* yang paling utama dalam membangun sebuah Negara. Sebuah negara akan rapuh jika keluarga-keluarga sebagai komponen bangsa itu rapuh, peran ayah dan ibu sangat dituntut dalam membentuk generasi penerus mereka. Tidak mengherankan jika para kader PKS memiliki tradisi membawa serta anak-anak mereka untuk turut terlibat dalam demonstrasi karena mereka meyakini bahwa hal tersebut merupakan bagian dari mengajarkan perjuangan sejak dini.

Sementara itu, misi yang ditetapkan PKS mencerminkan langkah-langkah dan agenda-agenda gerakan dakwah yakni; (1) menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak seluruh kadernya sebagai *anashir taghyir* (pelaku perubahan); (2) mengembangkan lembaga kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai *markaz taghyir* (pusat perubahan) dan pusat solusi; (3) membangun opini publik yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang dapat menjadi solusi dan membawa rahmat; (4) membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan, dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraan; (5) menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan terus-menerus dalam bingkai hukum dan etika Islam; (6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerja sama, *ishlah* dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk mewujudkan *ukhuwah Islamiyah* dan *wihdatul-ummah*, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi; dan (7) turut memberikan kontribusi secara positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezaliman, khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Bagi PKS, partai bukanlah bertujuan mengejar dan mempertahankan kekuasaan politik, melainkan bagian dari dakwah Islamiyah. Dengan demikian,

mendirikan partai politik sama merupakan salah satu ikhtiar dalam rangka mengoptimalkan upaya dakwah islamiyah sebagai salah satu kewajiban umat Islam. Tujuan luhur dari semua ini adalah aktualisasi universalitas Islam dalam upaya mewujudkan keseimbangan hidup manusia dan masyarakat dalam berbagai dimensi. Oleh karena itu, partai politik lalu berperan sebagai kekuatan alternatif bagi perjuangan politik kaum muslimin dalam mengemban tugas dakwah. Inilah yang menjadi alasan mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan dirinya sebagai partai dakwah.

Identitas PKS sebagai partai dakwah telah berkonsekuensi pada beban yang kompleks karena tidak hanya didirikan sebagai wadah agregasi dan artikulasi aspirasi politik umat, tetapi juga harus menjadi bagian penting dalam upaya memberdayakan umat, baik secara psikologis, sosiologis, ekonomis, maupun politis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika suatu gerakan politik berbasis Islam mempunyai suatu cita-cita yang tidak bertentangan dengan pengembangan bangsa, maka cita-cita harus dapat menyesuaikan dengan program-program politik bangsa meskipun Indonesia tidak seluruhnya mencerminkan doktrin-doktrin Islam.

Dalam pandangan PKS, dakwah harus dijalankan sebagai sebuah gerakan yang menyeluruh. Oleh sebab itu, aktivitas dakwah harus mampu mencetak kader-kader yang handal dari berbagai kalangan atau latar belakang kemampuan dan kemahiran yang saling berhubungan dalam upaya memperdayakan umat. Dengan demikian, konsep dakwah yang dikembangkan dalam konteks PKS adalah dakwah yang berorientasi pada aktivisme sosial. Aktivisme yang dimaksud adalah gerakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan dalam mendorong terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik (Fakhruroji, 2017).

Karena karakteristik dakwah yang bernuansa aktivisme sosial tersebut, tidak mengherankan jika konsep dakwah PKS banyak dikaitkan dengan gerakan-gerakan dakwah di Timur Tengah yang memang kental dengan nuansa politik. Bahkan PKS sering disebut-sebut sebagai partai politik yang mendapat inspirasi dari pemikiran Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir karena memiliki pola yang serupa dan banyak dikembangkan pada awalnya oleh pada aktivis muslim berbasis masjid kampus.

Tidak hanya itu, inspirasi gerakan ini juga dipertegas dengan banyaknya buku-buku hasil terjemahan karya Hasan al-Banna, Sayyid Quthb dan kemudian menjadi buku acuan dalam gerakan dakwah kampus. Adapun beberapa prinsip pemikiran Ikhwanul Muslimin yang disosialisasikan dalam lembaga-lembaga dakwah berbasis kampus antara lain bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat sempurna, yang tidak memisahkan satu aspek dengan aspek lainnya. Islam tidak dilihat dari perspektif yang memisahkan antara yang sakral dan profan. Secara

umum, konsep ini lazim dikenal sebagai Islam *kaffah*, yaitu wujud pemahaman Islam yang sempurna dan menyeluruh, yang menjangkau semua aspek dan dimensi kehidupan: duniawi-ukhrawi, jasmani-ruhani, *ubudiyah-mu'amalah*, sosial-politik, kultural-struktural dengan jargon *al-Islam Din wa Daulah*.

Ideologi ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan mencakup segala segi kehidupan. Ajaran Islam diyakini tidak hanya mengatur peribadatan ritual dan urusan-urusan privat semata, tetapi juga mengatur kehidupan publik umat Islam, terlebih dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, seluruh ajaran Islam menyangkut segenap bidang kehidupan dan harus diterapkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan begitu, Islam dipahami sebagai agama dan negara sekaligus. Dalam risalah lain, Hasan al-Banna bahkan menyatakan bahwa syarat kesempurnaan Islam seseorang ditandai dengan keterlibatannya dalam aktivitas politik.

Meski Ikhwanul Muslimin bukan satu-satunya inspirator konsep dakwah PKS, namun Ikhwanul Muslimin tetap menjadi kerangka utama pemikiran-pemikiran yang sering diperbincangkan dalam berbagai forum pelatihan kader PKS. Hal ini tidak mengherankan karena sepanjang 1980-an, transmisi pemikiran Ikhwanul Muslimin ke Indonesia telah memasuki tahapan pematangan melalui para alumni Timur Tengah. Kehadiran mereka telah menyebabkan gerakan dakwah kampus mengalami beberapa pergeseran. Hal ini dapat diidentifikasi melalui beberapa hal. *Pertama*, nama kegiatan dakwah berubah dari *usroh* jadi gerakan *tarbiyah*. *Kedua*, cakupan kegiatan menjadi lebih beragam: *usroh*, *liqo'*, *dauroh*, *riblah*, *mabit*, *mukeboyyam*, seminar dan bedah buku. Jenis-jenis kegiatan ini merupakan sarana pengkaderan yang juga dijalankan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan segera diadopsi oleh PKS. *Ketiga*, sistematika materi yang diajarkan lebih tertata dan terstandarisasi dengan menggunakan pendekatan khas Ikhwanul Muslimin.

Dalam Anggaran Dasar partai disebutkan bahwa PKS merupakan partai berasaskan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan sasaran perjuangan PKS adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggungjawab, peduli, sejahtera, dan bahagia, serta mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, dan berwibawa.

Menurut PKS, secara umum diperlukan pemberlakuan Undang-undang, hukum-hukum, dan ketentuan Islam bagi umat Islam, namun tetap ada Undang-undang dan ketentuan untuk non-muslim dan tidak ada paksaan bagi non-muslim untuk mengikuti ketentuan Islam tersebut. Dalam dasar pemikiran Kebijakan Dasar PKS tertulis bahwa "Islam adalah sistem integral yang mampu

membimbing umat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi.” Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan pribadi (*fitub kebabsab*) dan kemenangan secara umum (*fitub ‘amah*). Kemenangan pribadi diraih dengan ketaqwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan secara umum diraih dengan ketakwaan kolektif. Dakwah yang sistematis dan dilakukan secara terus-menerus adalah satu-satunya jalan menuju dua kemenangan tersebut.

Oleh karena itu, PKS memandang Islam sebagai aturan yang mengikat dalam hal *ubudiyah* (peribadatan), *mu’amalah* (interaksi dan relasi antarmanusia) dan *siyasah* (politik kenegaraan). Dengan demikian, sistem ritual, kemasyarakatan, dan negara harus diatur dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk berjuang menegakkan kehidupan yang Islami dan menerapkan syari’at Islam sebagai dasar hukum publik. Untuk mengembalikan masyarakat kepada tuntunan Allah diperlukan gerakan dakwah, yang pada hakikatnya merupakan proses transformasi dan perubahan menuju tatanan kehidupan yang Islami, baik pada level perorangan maupun pada level kemasyarakatan dan kenegaraan. Gerakan dakwah akan efektif jika didukung oleh *manhaj*, *uslub*, dan *wasilah* yang jelas serta terjun dalam seluruh sektor kehidupan, termasuk wilayah politik.

Dalam salah satu kebijakan umum PKS, penguatan ideologi Islami di kalangan kadernya merupakan agenda yang sangat penting melalui rumusan sebagai berikut; (1) memproyeksikan Islam sebagai ideologi umat yang melandasi seluruh perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin; (2) menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan dalam melakukan pembebasan manusia dari penghambaan antarsesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT.; pembebasan manusia dari kefakiran ideologi rekaman manusia menuju keadilan Islam dan mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa konsep dakwah yang menjadi dasar gerakan PKS sebagai partai politik Islam adalah universalisme dakwah yang melihat bahwa dakwah adalah pekerjaan yang panjang dan multidimensi. Politik adalah dakwah karena dilakukan sebagai upaya untuk mengatur kehidupan manusia melalui formalisasi hukum-hukum bernuansa Islam melalui Undang-undang yang bersifat formal dan objektif.

Pola Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera

Selain sebagai partai dakwah, PKS juga menjadikan Islam sebagai ideologi. Ideologi PKS berpijak pada prinsip utama bahwa Islam merupakan konsep yang utuh dan sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam merupakan petunjuk bagi manusia untuk mengelola seluruh aspek kehidupan. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan ajaran

Islam. Dalam hal ini, Islam dipahami sebagai agama (*ad-din*), yakni sebuah pedoman hidup dalam rangka penghambaan dan upaya penyerahan diri kepada Allah SWT., dan sekaligus negara (*ad-daulah*), yakni tata aturan kehidupan dalam konteks negara dan kekuasaan. Oleh karena itu, ideologi sekular yang memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan politik kenegaraan atau hal-hal selain agama tidak dapat diterima. Agama tidak bisa hanya menjadi aturan dalam domain privat, tetapi juga harus merambah ke domain publik.

Dengan fakta ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengidentifikasi diri sebagai partai dakwah yakni sebagai ajakan kebenaran serta ajakan untuk meninggalkan keburukan yang tidak hanya untuk individu dan kelompok tertentu tetapi terbuka untuk umum. Keterbukaan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah kekuatan dakwah politik itu sendiri yang mencetuskan para kader-kader dakwah politik. Awalnya yang dilakukan untuk berdakwah hanya dilakukan di ruang lingkup masjid dan mimbar, kini menjadi lebih luas lagi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa dimensi politik baik menyangkut pesan maupun lingkungan dimana dakwah dijalankan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan dakwah (Muhtadi, 2008; Rakhmat, 1999). Dengan demikian, pendekatan dakwah dalam strategi komunikasi politik PKS ini dapat dipahami sebagai dakwah mengingat fungsi dakwah sebagai saluran akulturasi agama dalam tataran kehidupan masyarakat, senantiasa bersentuhan dengan gerak masyarakat yang mengitarinya.

Berkenaan dengan hal ini, PKS memahami keterbukaan ideologi partai sebagai sebuah kerjasama, saling membantu atau gotong royong. Pada intinya, toleransi, saling menghargai, saling menghormati serta sikap moderat akan berpengaruh pada eksistensi partai. Gagasan-gagasan inilah yang kemudian dikomunikasikan oleh pihak partai kepada masyarakat sebagai konstituen. Oleh sebab itu, pola komunikasi politik PKS yang akan diuraikan dalam tulisan ini meliputi dua hal, yakni pola komunikasi dakwah para kader dan pola komunikasi dalam konteks pilkada.

Secara umum, istilah pola komunikasi biasa disebut pula sebagai model komunikasi, yakni sebuah sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk tujuan penyampaian suatu pesan kepada masyarakat. Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan atau relasi unsur-unsur yang dicakup guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pola” diartikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap (Badudu, 1994: 321). Sementara itu, komunikasi merupakan proses dimana suatu gagasan ditransformasikan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

Dengan begitu, pada dasarnya komunikasi adalah tindakan yang amat sederhana, yakni aktivitas yang timbul karena seseorang ingin menyampaikan

informasi kepada orang lain. Informasi ini membuat seorang penerima memahami dengan cara yang sama seperti pelaku komunikasi tersebut atau dapat juga berlainan, karena informasi yang dikomunikasikan tersebut membuat orang-orang mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian. Kesamaan atau perbedaan pemahaman ini disebabkan oleh persepsi orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.

Secara praktis, pola komunikasi politik berarti struktur atau sistematika komunikasi yang berupa pesan-pesan politik atau kepentingan-kepentingan tertentu yang dijalankan dalam kerangka aktivitas politik. Pun demikian, komunikasi politik juga sering dipahami secara praktis sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh aktivis, fungsionaris atau bahkan sebuah partai politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membangun komunikasi melalui beberapa jalur utama yang digunakan jika seorang untuk bergabung sebagai simpatisan PKS., yakni jalur lembaga dan non-lembaga. Jalur lembaga meliputi organ-organ yang dibentuk partai, maupun lembaga afiliasi partai sedangkan jalur non-lembaga meliputi pendekatan personal dan layanan sosial kemasyarakatan. Untuk memperkuat kualitas dan loyalitas para kader, PKS tetap mempertahankan ciri khasnya yakni dengan menggunakan berbagai saluran pertemuan berbentuk kajian-kajian berbasis masjid kampus dan komunitas-komunitas tertentu.

Sementara itu, pola komunikasi politik dakwah dalam konteks suksesi kepala daerah yang dijalankan oleh PKS adalah juga dengan melakukan pendekatan persuasif antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian bahan pokok, sayuran dan bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan popularitas calon kepala daerah yang diusung, pihak PKS tidak hanya menggunakan atribut kampanye, tetapi juga menggunakan sejumlah saluran media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp* dan platform lainnya yang dikelola secara profesional oleh tim pemenangan.

Selain itu, tentu saja PKS juga melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan seluruh kader untuk sama-sama menyukseskan calon yang diusung oleh PKS dan menghimbau agar seluruh kader dapat solid dalam memberikan dukungan kepada calon yang bersangkutan. Sebagaimana peserta pilkada lainnya, PKS juga melakukan berbagai pendekatan persuasif dan komunikasi interpersonal kepada masyarakat untuk meraih dukungan calon mereka. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat secara *door to door*. Agar komunikasi politik menjadi lebih efektif, pesan politik harus dikemas dengan sederhana tanpa menghilangkan esensi pesan politik itu sendiri. Mengingat tingkatan pendidikan masyarakat juga berbeda-beda, PKS selalu berusaha untuk menyajikan pesan politik disesuaikan dengan taraf pendidikan masyarakat.

Adapun medium yang digunakan untuk sosialisasi dalam komunikasi politik itu sangat bervariasi yang secara keseluruhan berisi tentang gagasan dan pemikiran calon sebagai representasi dari partai. Salah satu karakteristik kampanye politik PKS dalam konteks pilkada adalah dengan menjalankan fungsi “mengingat” unsur sederhana baik secara visual maupun audio-visual. Fungsi ini terbukti berhasil di beberapa pilkada seperti di Jawa Barat dan beberapa kabupaten dan kota di beberapa Provinsi. Fungsi “mengingat” ini dijalankan secara terus-menerus sehingga benar-benar menjadi sesuatu yang akrab dengan masyarakat.

Namun demikian sebagai partai yang bernuansa dakwah, setiap kampanye PKS sesungguhnya telah dimulai jauh-jauh hari sebelum perhelatan suksesi dimulai. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa kegiatan-kegiatan bakti sosial kepada masyarakat dan semacamnya telah identik dengan pengabdian masyarakat yang biasa dilakukan oleh PKS sehingga ketika tiba saaatnya suksesi, masyarakat biasanya telah mengenal sosok calon yang diusung PKS, atau paling tidak, masyarakat memiliki keberpihakan terhadap PKS sehingga dapat menggunakan hak suaranya dengan mendukung PKS. Hal ini merupakan strategi komunikasi politik khas PKS. Kampanye politik tidak hanya sebatas pada periode menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah saja, akan tetapi sebelum dan sesudah pemilu juga berperan amat penting dalam pembentukan image politik yang kelak justru akan dapat memengaruhi perilaku pemilih dalam mengevaluasi kualitas kontestan.

PENUTUP

Partai dakwah sebagai identitas yang melekat pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diidentifikasi tidak hanya dari aspek administratif sebagaimana idealism yang terkandung dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mereka, tetapi juga dapat dilacak dari akar historis bagaimana partai ini terbentuk dari kelompok-kelompok dakwah tarbiyah dengan pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pemikir dan gerakan dakwah di Timur Tengah, khususnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Idealisme ini menjadi mereka untuk melakukan formalisasi dakwah dalam kerangka gerakan politik yang kongkrit sehingga dapat membangun peradaban manusia sesuai dengan ajaran Islam.

Semangat dakwah dapat dilihat dari visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sehingga gerakan dan program politik yang mereka gulirkan bukan hanya berorientasi kekuasaan, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun peradaban manusia yang lebih baik. Bagi PKS, dakwah adalah inti dari seluruh motivasi gerakan politik mereka, bahkan asal-usul partai ini pun berkaitan dengan gerakan dakwah yang dimulai dari diskusi-diskusi dalam lingkup komunitas. Meski demikian, partai ini menyadari bahwa Indonesia memang bukan negara Islam, namun ajaran Islam dapat diformalkan sebagai

sesuatu yang bersifat objektif melalui pengesahan undang-undang dan peraturan demi kepentingan manusia Indonesia secara menyeluruh. Idealisme inilah yang dinilai oleh banyak pihak menjadi faktor kuatnya militansi kader PKS.

Untuk menjaga dan memelihara militansi para kader, pola komunikasi politik yang dijalankan oleh PKS dapat dikategorikan pada dua kategori besar yakni, komunikasi politik terhadap kader dan komunikasi politik dalam konteks suksesi menghadapi perhelatan pilkada. Komunikasi yang politik dibangun dalam konteks kader sebagian besar dilakukan dalam bentuk halaqah, kajian-kajian Islam dan politik sehingga memberikan pengayaan wacana politik Islam dan menumbuhkan semangat untuk berdakwah melalui jalur politik. Sementara itu komunikasi dalam konteks pilkada sesungguhnya tidak dilakukan secara spesifik karena PKS berkeyakinan bahwa pilihan politik bukan ditentukan oleh kampanye menjelang pilkada atau pemilihan umum, akan tetapi dijalankan sepanjang tahun. Namun demikian, PKS tetap menjalankan komunikasi politik sebagai upaya untuk merawat hubungan baik dengan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan ini biasanya digelar melalui kegiatan bakti sosial, mengadakan pengajian umum dan sosialisasi secara *door to door*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2011). Komunikasi politik: Filsafat- Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badudu, J. S. (1994). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Basyir. (2014). Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera(PKS): Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme.
- Boangmanalu, A. S. (2019). Pandangan PKS Pakpak Barat Terhadap Partisipasi Politik Perempuan. Universitas Sumatera Utara.
- Djuhana, A., & Nuraeni, N. (2019). Keunikan Pola Rekrutmen dan Pembinaan Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Membangun dan Memperkokoh Soliditas Partai.
- Fakhruroji, M. (2014). Agama dalam Pesan Pendek: Mediatisasi dan Komodifikasi Agama dalam SMS Tauhiid. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fakhruroji, M. (2017). Dakwah di Era Media Baru: Teori dan Aktivisme Dakwah di Internet. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Haris, M. (2008). Partai Islam di Komunitas Abangan (studi Kasus Kemenangan PKS di Desa Jetak Kabupaten Getasan pada pemilu 2004.
- Hasjmy, A. (1983). Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. Bandung: Alma'arif.

- Heryanto, G. G., & Rumar, S. (2012). *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2008). *Theories of Human Communication*. Belmont, CA.: Thomson/Wadsworth.
- Muchtar, K., & Aliyudin, A. (2019). Public Relations Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Jawa Barat. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 61–78. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5047>
- Muhtadi, A. S. (2008). *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhyiddin, A. (2002). *Dakwah dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Kritis atas Visi, Misi dan Wawasan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulkhan, A. M. (1996). *Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episod Kehidupan M Natsir dan Azhar Basyir*. Yogyakarta: SIPress.
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurulloh, D. G. M. (2018). *Etika Politik Hasan Al Banna dan Pengaruhnya Terhadap Partai Keadilan Sejahtera tahun 2004-2014*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Nurussa'adah, E., & Sumartias, S. (2017). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i1.8522>
- Rakhmat, J. (1999). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rokhmad, A. (2014). Dasar Negara dan Taqiyah Politik PKS. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 1–24. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.255>
- Sambas, S. (1995). *Konstruksi Keilmuan Dakwah Islam Perspektif Filsafat Ilmu: Upaya Memahami dan Sosialisasi Pemberlakuan Kurikulum Nasional Fakultas Dakwah Tahun 1994*. Bandung: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sholeh, F. T. (2015). *Manhaj Tarbiyah dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Supriyatna, I. (2017). Pergolakan antara Kepentingan Dakwah dengan Kepentingan Politik dalam Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera di Sulawesi Tenggara.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suroto. (2015). Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis). *Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(9), 664–671.
- Susanti, S., & Lubis, A. (2015). Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*,

- 3(1), 1–13. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/906>
- Syamsuadi, A., Zamhasari, Z., Hartati, S., & Trisnawati, L. (2020). Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.8162>
- Syukir, A. (1983). *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Tabroni, R. (2012). Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 105–116.
- Tabroni, R. (2017). Komunikasi Politik Mohammad Natsir. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 39–60. <https://doi.org/10.15575/cjik.v1i1.1208>
- Tanjungsari, A. R. (2016). Gerakan Dakwah sebagai Sistem kaderisasi PKS (Studi pada Dewan Pengurus Wilayah Jawa Tengah).

